

BAB II

KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian dari tindakan peneliti dalam menganalisis perbedaan dan persamaan ataupun mengkaji riset ilmiah yang telah dilaksanakan dalam suatu topik tertentu. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu, dicantumkan berbeda oleh peneliti dengan penjabaran seringkas mungkin. Dibawah ini terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang dikaji.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ririn Rahayu pada tahun 2020 melalui skripsi berjudul *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pada Program Kemitraan Bina Lingkungan serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), (Rahayu 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, program CSR yang dilaksanakan oleh PT Semen Indonesia secara umum telah terlaksana, namun masih terdapat kelemahan pada proses pengawasan dan evaluasi, sehingga pelaksanaan program belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.

Keterkaitan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu terletak pada kesamaan objek penelitian, yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, serta kajian mengenai pelaksanaan program CSR perusahaan. Sementara itu, perbedaan penelitian terlihat pada fokus pembahasan, di mana penelitian Rahayu mengkaji implementasi CSR secara umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada analisis efektivitas pelaksanaan program CSR melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK) sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wahyu Agung Setio Prabowo pada tahun 2022 melalui skripsi berjudul *Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Dampak Program Green Belt terhadap Petani di Kabupaten Tuban*, (Prabowo, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan program Corporate Social Responsibility PT Semen Indonesia (Persero) Tbk melalui Program Green Belt serta dampaknya terhadap kondisi sosial dan ekonomi petani di Kabupaten Tuban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara serta telaah dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program *Green Belt* tidak hanya berperan sebagai upaya pengendalian dan rehabilitasi lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi petani melalui pemanfaatan lahan produktif serta meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Relevansi penelitian ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Prabowo terletak pada kesamaan lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Tuban, serta pembahasan tentang program CSR PT Semen Indonesia yang ditujukan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus kajian, dengan penelitian Prabowo yang lebih menitikberatkan pada dampak Program CSR *Green Belt* terhadap petani, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas peran Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Redi Mardiansyah pada tahun 2019 melalui skripsi berjudul *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Baturaja di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU* (Mardiansyah, 2019). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan semen sebagai upaya untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program CSR PT Semen Baturaja diarahkan pada pengelolaan lingkungan peningkatan edukasi masyarakat mengenai kesehatan

lingkungan serta upaya pengurangan pencemaran. Penelitian ini menegaskan peran perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak industri bagi masyarakat sekitar. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan konteks kajian mengenai pelaksanaan CSR pada perusahaan semen serta penggunaan pendekatan studi kasus. Letak perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Mardiansyah terdapat pada aspek analisis, yang dalam penelitiannya lebih memfokuskan pada implementasi CSR dari aspek lingkungan, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada efektivitas program CSR di bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK) di Desa Tuwiri Wetan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Clara Kumala pada tahun 2023 dengan judul *Hubungan antara Minat dan Motivasi dengan Penilaian Masyarakat Binaan terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Indonesia Pabrik Tuban Tbk* (Kumala, 2023). Penelitian ini mengkaji keterkaitan tingkat minat dan motivasi masyarakat binaan dengan penilaian keberhasilan program CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berpendekatan asosiatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden yang dipilih menggunakan *cluster random sampling*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat minat dan motivasi memiliki hubungan yang bermakna serta berdampak positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program CSR, baik secara individual maupun simultan.

Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan konteks kajian, yaitu pelaksanaan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat serta penilaian terhadap keberhasilan program. Adapun perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian, di mana penelitian Kumala menekankan analisis hubungan antarvariabel secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada kajian efektivitas pelaksanaan

program CSR melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Muhammad Sulthan Adhiatma pada tahun 2023 dengan judul *Community Perspective on the Implementation of Corporate Social Responsibility Programs (Case Study of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in Gresik City)* (Adhiatma, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif masyarakat Kota Gresik terhadap ketepatan sasaran serta pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* yang diselenggarakan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan program CSR dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kondisi ekonomi masyarakat Program CSR yang berupa kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan sembako dinilai telah sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat meskipun penerapan konsep *Creating Shared Value (CSV)* belum dapat teridentifikasi secara jelas.

Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus kajian mengenai implementasi program CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk serta penilaian masyarakat terhadap program tersebut. Perbedaannya terdapat pada sudut pandang analisis, di mana penelitian Sulthan Adhiatma lebih menekankan pada perspektif masyarakat terhadap implementasi CSR, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis efektivitas pelaksanaan program CSR melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Penelitian keenam dilakukan oleh Farid Hidayat dengan judul *Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban*. Penelitian ini menelaah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban dengan menitikberatkan pada kesesuaian pelaksanaan CSR terhadap regulasi yang berlaku, termasuk regulasi tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan pengelolaan

lingkungan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa meskipun PT Semen Indonesia telah melaksanakan sebagian besar kewajiban hukum, pelaksanaan CSR masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan transparansi informasi, belum meratanya keterlibatan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat lokal.

Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu implementasi program CSR PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Farid Hidayat menekankan kajian yuridis serta kesesuaian pelaksanaan CSR dengan ketentuan regulasi hukum, adapun penelitian ini menitikberatkan pada penilaian efektivitas pelaksanaan program CSR melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Ririn Rahayu (2020). “ <i>Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.</i> ”	Implementasi CSR PT Semen Indonesia secara umum telah berjalan dengan baik pada program kemitraan, bina lingkungan, serta TJSL. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek pengawasan dan evaluasi sehingga belum seluruh program berjalan optima	Relevan karena sama-sama mengkaji implementasi program CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Ririn Rahayu menganalisis

			implementasi CSR secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan program CSR melalui Forum Masyarakat Kokoh (FMK).
2.	Wahyu Agung Setio Prabowo (2019). ”Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk: Dampak Program Green Belt terhadap Petani di Kabupaten Tuban”	Program Green Belt tidak hanya berfungsi sebagai upaya rehabilitasi dan pengendalian lingkungan, tetapi juga meningkatkan manfaat ekonomi bagi petani melalui pemanfaatan lahan produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Relevan karena sama-sama mengkaji program CSR PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban dengan pendekatan kualitatif serta melibatkan masyarakat penerima program sebagai subjek penelitian. Perbedaan terlihat pada fokus kajian, dengan penelitian Prabowo lebih memfokuskan pada dampak Program Green Belt, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas peran FMK dalam pelaksanaan program CSR pemberdayaan masyarakat.
3.	Redi Mardiansyah (2022). Implementasi	Program CSR PT Semen Baturaja difokuskan pada pengelolaan lingkungan, edukasi	Relevan karena sama-sama mengkaji pelaksanaan CSR pada perusahaan semen dengan

	<p><i>Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Baturaja di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU</i></p>	<p>masyarakat tentang kesehatan lingkungan, serta upaya pengurangan pencemaran sebagai bentuk mitigasi dampak industri.</p>	<p>pendekatan kualitatif, serta melibatkan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan sebagai subjek penelitian. Perbedaan terlihat pada fokus kajian; penelitian Mardiansyah menekankan aspek lingkungan, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas pelaksanaan program CSR bidang pemberdayaan masyarakat melalui FMK.</p>
<p>4.</p>	<p><i>Clara Kumala (2023). Hubungan antara Minat dan Motivasi dengan Penilaian Masyarakat Binaan terhadap Keberhasilan Program CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban, Tbk</i></p>	<p>Tingkat minat dan motivasi masyarakat binaan berkaitan secara signifikan dengan keberhasilan program CSR.</p>	<p>Relevan karena sama-sama mengkaji CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban dan melibatkan masyarakat binaan sebagai objek kajian. Pendekatan penelitian menjadi pembeda di mana penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif dengan kuesioner sedangkan penelitian lain menggunakan studi kasus kualitatif untuk melakukan analisis efektivitas pelaksanaan</p>

			program CSR melalui FMK.
5.	Muhammad Sulthan Adhiatma (2023). <i>Community Perspective on the Implementation of Corporate Social Responsibility Programs (Case Study of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in Gresik City)</i>	Program CSR PT Semen Indonesia berupa pelatihan dan bantuan sembako dinilai telah sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, meskipun penerapan konsep Creating Shared Value (CSV) belum teridentifikasi secara jelas.	Relevan karena sama-sama mengkaji implementasi CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian, di mana Sulthan Adhiatma menitikberatkan perspektif masyarakat, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas kelembagaan FMK dalam pelaksanaan CSR pemberdayaan masyarakat.
6.	Farid Hidayat (2025). <i>Analisis Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social</i>	PT Semen Indonesia telah memenuhi sebagian besar kewajiban hukum dalam pelaksanaan CSR, namun masih terdapat kendala dalam transparansi informasi, pemerataan keterlibatan	Relevan karena memiliki objek dan lokasi kajian yang sama, yaitu CSR PT Semen Indonesia di Kabupaten Tuban. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana Farid

	<i>Responsibility)</i> <i>PT Semen</i> <i>Indonesia di</i> <i>Kabupaten</i> <i>Tuban</i>	masyarakat, serta pengelolaan dampak lingkungan.	Hidayat menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan pendekatan kualitatif jenis studi kasus digunakan pada penelitian ini untuk menilai efektivitas pelaksanaan CSR melalui FMK dalam pemberdayaan masyarakat.
--	--	--	--

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Program

Dalam praktik pelaksanaan program CSR di tingkat desa, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh tersedianya anggaran dan jenis program yang dijalankan, tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme kelembagaan dan kapasitas aktor pelaksana, dalam hal ini Forum Masyarakat Kokoh (FMK). Meskipun FMK dibentuk sebagai forum multipihak yang bertujuan menjembatani kepentingan perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat, pelaksanaan peran tersebut berpotensi menghadapi berbagai dinamika di lapangan. Dinamika tersebut meliputi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan koordinasi antaraktor, serta variasi pemahaman masyarakat terhadap tujuan program CSR yang dijalankan. Dalam konteks pelaksanaan CSR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Desa Tuwiri Wetan, efektivitas FMK menjadi isu penting karena FMK tidak hanya bertindak sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai pengelola, pendamping, serta pengawas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pada tataran empiris, tantangan efektivitas dapat muncul ketika proses penentuan sasaran program belum sepenuhnya partisipatif, koordinasi antara FMK dan masyarakat desa belum berjalan optimal, atau ketika program yang dijalankan belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan efektivitas juga dapat dilihat dari keberlanjutan manfaat program CSR yang diterima oleh masyarakat. Program yang secara administratif terlaksana belum tentu memberikan dampak jangka panjang apabila tidak disertai dengan pendampingan yang memadai dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu, efektivitas FMK tidak hanya dinilai dari jumlah program yang terealisasi, melainkan juga dari sejauh mana program tersebut tepat sasaran, mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, serta berkontribusi pada kemandirian ekonomi desa. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas pelaksanaan program CSR melalui FMK relevan untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana FMK menjalankan perannya di Desa Tuwiri Wetan, sejauh mana program CSR dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, serta bagaimana manfaat program dirasakan oleh masyarakat penerima. Dengan demikian, konsep efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi dianalisis berdasarkan realitas pelaksanaan program CSR di tingkat desa.

2.2.2 Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan atau pelaku bisnis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sistematis sebagai wujud sikap etis perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang menunjukkan kontribusi perusahaan kepada masyarakat, melalui pemberian bantuan maupun pelaksanaan program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. CSR bisa diartikan sebagai komitmen suatu perusahaan terhadap *stakeholder* untuk bertindak secara etis, mengurangi dampak negatif sekaligus meningkatkan dampak positif yang mencakup beberapa aspek, yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Laila et al. 2022). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan gagasan yang semakin signifikan dalam dunia bisnis modern dan memiliki peran penting dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs). CSR bukan sekadar kegiatan filantropi atau pemberian bantuan sosial

secara temporer, melainkan merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk bertindak secara etis, mematuhi hukum, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup tenaga kerja. Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, CSR diartikan sebagai sebuah komitmen sebuah perusahaan untuk konsisten bertindak etis, mendukung pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup pekerja, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan.

Konsep *Triple Bottom Line (TBL)* diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 melalui bukunya yakni, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Elkington mengembangkan TBL sebagai kerangka kerja yang menekankan tiga dimensi utama, yakni kesejahteraan ekonomi, mutu lingkungan, dan keadilan sosial yang kemudian dikenal dengan *Triple Bottom Line*, yakni *people, profit, dan planet*. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial serta pelestarian lingkungan, sehingga keberlanjutan usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan semata.

Dalam penerapannya, konsep TBL menuntut perusahaan agar tidak berfokus pada pencapaian keuntungan finansial saja tetapi juga turut berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan diharapkan mampu melibatkan diri secara aktif dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat (*people*) sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan (*planet*) sebagai bagian dari tanggung jawab keberlanjutan (Pilaradiwangsa, 2016).

a) *People*

menekankan perhatian perusahaan terhadap manusia sebagai elemen utama dalam keberlangsungan kegiatan usaha. Masyarakat menjadi faktor yang sangat penting bagi stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam dimensi *people* mencakup individu maupun kelompok yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas perusahaan, seperti karyawan beserta

keluarganya, pemasok, konsumen, komunitas sekitar, serta berbagai pihak lain yang bisa dipengaruhi oleh keberadaan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu mengembangkan berbagai program yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat.

b) *Profit*

berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi. Meskipun keuntungan merupakan tujuan utama aktivitas bisnis, perusahaan tidak seharusnya hanya mengejar manfaat ekonomi bagi organisasi semata, melainkan juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian para pemangku kepentingan. Aspek ini mencakup kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas ekonomi internal sekaligus memberikan dampak ekonomi secara lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan inovasi yang bernilai ekonomi.

c) *planet*

merujuk pada perhatian perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas operasionalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mempertahankan lingkungan sebagai ruang tempat berlangsungnya kegiatan usaha. Kepedulian terhadap lingkungan, terutama di sekitar wilayah operasional perusahaan, menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Selain *Triple Bottom Line* sebagai kerangka teori umum, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menerapkan empat pilar CSR yang menjadi pedoman khusus perusahaan, yaitu:

1. **Sosial**, menekankan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui berbagai program yang melibatkan komunitas sekitar pabrik.
2. **Ekonomi**, menekankan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal, termasuk menciptakan lapangan kerja, mendukung UMKM, dan pengembangan ekonomi komunitas.
3. **Lingkungan**, menekankan pengelolaan dampak operasional pabrik secara berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, dan efisiensi sumber daya.
4. **Hukum dan Tata Kelola**, menekankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, etika bisnis, dan tata kelola yang baik.

Keempat pilar ini menunjukkan bahwa CSR di PT Semen Indonesia tidak berfokus pada bantuan sosial semata, tetapi merupakan strategi berkelanjutan yang memadukan manfaat sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola secara menyeluruh. CSR yang efektif juga menuntut keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*). Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar, pemerintah, karyawan, dan komunitas, bukan hanya penerima manfaat, tetapi bagian dari ekosistem perusahaan yang dapat memberikan kontribusi sekaligus menjadi sumber risiko. Keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program membantu meningkatkan efektivitas program, membangun legitimasi sosial, dan meminimalkan potensi konflik. Dengan integrasi antara dukungan terhadap SDGs, *Triple Bottom Line*, empat pilar CSR PT Semen Indonesia, dan keterlibatan stakeholder, CSR tidak hanya memberikan manfaat sosial dan lingkungan saja, tetapi juga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Pendekatan ini relevan dalam konteks penelitian tentang efektivitas Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dalam pelaksanaan CSR di Pabrik Tuban, karena memungkinkan analisis terhadap sejauh mana program CSR memenuhi tujuan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan aktif.

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan berasal dari istilah dasar 'daya' yang merujuk pada kemampuan atau kekuatan. Dari pengertian tersebut, pemberdayaan dipahami sebagai proses memperoleh kemampuan atau kekuatan sekaligus sebagai proses transfer kemampuan atau kekuatan dari pihak yang lebih berdaya kepada pihak yang kurang berdaya (Sinurat, 2022). Berdasarkan berbagai pengertian, pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memperoleh atau menyalurkan daya, kekuatan, dan kemampuan kepada individu maupun masyarakat yang rentan agar mereka mampu mengenali, menganalisis, menentukan kebutuhan, potensi, dan masalah yang ada, serta memilih solusi alternatif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Helminasari, 2025). Dalam kajian pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa masyarakat dan lembaga atau pihak yang melaksanakan program pemberdayaan harus memiliki kedudukan yang sejajar, berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Hubungan yang dibangun bersifat setara melalui mekanisme pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Setiap individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga terbentuk proses belajar-mengajar, saling menolong, bertukar pengalaman, dan saling memberi dukungan, yang pada akhirnya mendorong masyarakat menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Hapsari, 2022).

2. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif disetiap tahap pelaksanaan program pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan. Program yang bersifat partisipatif mampu menstimulasi kemandirian masyarakat karena masyarakat diposisikan sebagai subjek utama, bukan sekadar

penerima manfaat. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, diperlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki motivasi dan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan menyoroti kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Masyarakat dipandang bukan sebagai kelompok yang tidak berdaya melainkan sebagai subjek yang memiliki potensi dan kemampuan terbatas. Pengetahuan lokal, kondisi lingkungan, tenaga kerja, motivasi, serta norma sosial masyarakat menjadi modal utama dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, bantuan dari pihak luar berperan sebagai pendukung dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemandirian masyarakat.

4. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa program pemberdayaan masyarakat harus dirancang untuk dapat berjalan dan berkelanjutan. Di awal proses, peran pendamping masih dominan, namun secara bertahap peran tersebut dikurangi seiring meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan secara mandiri. Program pemberdayaan berkelanjutan diarahkan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kepada masyarakat sehingga mereka mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidupnya secara layak dan berkelanjutan.

Pemberdayaan merupakan merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam kerjasama kelompok formal dan nonformal untuk menganalisis masalah, merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program yang telah disepakati bersama. Proses pemberdayaan dapat diukur melalui:

1. Kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan analisis masalah

2. Perencanaan program pemberdayaan
3. Pelaksanakan program pemberdayaan
4. Keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan.

2.3 Landasan Teori

Dalam kajian pembangunan sosial, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dimaknai secara terbatas sebagai sekadar bantuan materi atau peningkatan kemampuan individu. Jim Ife menempatkan pemberdayaan sebagai sebuah proses sosial yang bersifat multidimensional, yang mencakup dinamika relasi kekuasaan, kondisi struktur sosial, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan pola pikir dan kesadaran sosial masyarakat itu sendiri. Melalui pemberdayaan, masyarakat diharapkan memiliki kapasitas untuk mengendalikan kehidupan mereka, berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan serta memiliki akses setara terhadap sumber daya sosial, ekonomi, dan politik (Ife, 2013). Lebih lanjut, Jim Ife menjelaskan bahwa proses pemberdayaan perlu dimulai dari pemahaman yang bersifat kritis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan pragmatis, tetapi juga mengandung dimensi politis dan ideologis.

Hal ini karena pemberdayaan berkaitan erat dengan upaya mengkritisi dan menantang struktur kekuasaan yang tidak seimbang, sekaligus mendorong terwujudnya transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil. Dalam kerangka tersebut, Jim Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipahami melalui empat perspektif utama, yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis. Keempat perspektif ini menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat serta bagaimana strategi pemberdayaan dijalankan, mulai dari peningkatan partisipasi dalam sistem yang ada hingga upaya transformasi struktur sosial dan wacana dominan yang menghasilkan ketimpangan (Ife 2013).

1. Perspektif Pluralis

Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses penguatan individu dan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang menguntungkan agar mampu berkompetisi secara lebih seimbang dengan berbagai kepentingan lain dalam masyarakat. Perspektif ini berangkat dari pandangan bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok dengan kepentingan yang beragam, di mana ketimpangan terjadi ketika sebagian kelompok tidak memiliki kapasitas, keterampilan, serta akses yang memadai untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, pemberdayaan lebih ditekankan pada upaya penguatan kapasitas, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, serta kemampuan mengakses informasi dan sumber daya. Dengan meningkatnya kapasitas tersebut, masyarakat diupayakan mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan mereka secara mandiri. Perspektif pluralis memandang pemberdayaan sebagai upaya menciptakan kesetaraan kesempatan, bukan sebagai proses perubahan struktur sosial secara radikal (Syukur et al., 2023).

2. Perspektif Elitis

Dalam perspektif elitis menurut teori pemberdayaan Jim Ife, kondisi ketidakberdayaan masyarakat tidak semata-mata dipicu oleh keterbatasan kapasitas, tetapi juga oleh kuatnya dominasi kelompok *elite* dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada upaya untuk melibatkan, memengaruhi, bahkan menantang peran kelompok *elite* baik *elite* politik, ekonomi, maupun sosial yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah kebijakan. Dalam perspektif ini, strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembentukan aliansi dengan *elite*, *advokasi* kebijakan, proses *negosiasi*, hingga *konfrontasi* apabila diperlukan, dengan tujuan mengubah keputusan dan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Perspektif elitis menegaskan bahwa perubahan sosial tidak hanya dapat dicapai melalui pendekatan dari bawah (*bottom-up*), tetapi juga memerlukan intervensi pada level

pengambil keputusan (*top-down*). Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada penguatan masyarakat akar rumput, melainkan juga mencakup upaya memengaruhi struktur kekuasaan supaya lebih peka terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat terutama dalam konteks program pembangunan atau *corporate social responsibility (CSR)* yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.

3. Perspektif Strukturalis

Dalam perspektif strukturalis, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai bagian dari agenda perjuangan sosial yang diarahkan untuk mengurangi bahkan menghapus ketimpangan yang bersumber dari struktur sosial yang timpang. Jim Ife menegaskan bahwa masyarakat tidak akan mencapai kondisi benar-benar berdaya selama struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil masih terus dipertahankan. Perspektif ini melihat ketidakberdayaan masyarakat bukan sebagai persoalan individual atau kelompok semata, melainkan sebagai dampak dari sistem dan struktur yang bersifat menindas. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan harus diarahkan pada transformasi struktural, seperti perubahan kebijakan publik, sistem ekonomi, relasi produksi, serta mekanisme distribusi sumber daya. Pemberdayaan dalam perspektif strukturalis tidak hanya berorientasi pada capaian jangka pendek, tetapi menekankan pentingnya transformasi sosial jangka panjang. Dengan demikian, pemberdayaan ditempatkan sebagai bagian dari perjuangan *keadilan sosial*, di mana masyarakat didorong untuk memahami posisi mereka dalam struktur sosial serta terlibat dalam upaya kolektif guna mewujudkan tatanan sosial yang lebih adil dan setara.

4. Perspektif post-strukturalis

Dalam perspektif *post-strukturalis* menurut teori Jim Ife, pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur dan distribusi kekuasaan, tetapi juga berhubungan erat dengan transformasi *wacana*, pola pikir, dan konstruksi makna sosial. Perspektif ini memandang ketidakberdayaan tidak semata-mata berasal dari struktur sosial atau relasi

kekuasaan yang timpang, melainkan juga dari cara masyarakat memaknai diri, peran sosial, serta realitas yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pemberdayaan lebih difokuskan pada penguatan kesadaran kritis, proses refleksi diri, dan pengembangan *pengetahuan alternatif*. Masyarakat didorong untuk mengkritisi *wacana dominan* yang memosisikan mereka sebagai kelompok yang lemah, pasif, atau bergantung, sekaligus membangun pemaknaan baru yang lebih memberdayakan. Dalam kerangka ini, pemberdayaan dipahami bukan sekadar sebagai rangkaian kegiatan atau praktik teknis, melainkan sebagai proses intelektual dan kultural yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial melalui perubahan cara berpikir dan pemahaman terhadap realitas sosial.

Fokus utama teori mengenai pemberdayaan masyarakat menurut Jim Ife adalah memandang pemberdayaan sebagai suatu proses sosial yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, relasi kekuasaan, serta upaya mendorong masyarakat agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan Jim Ife digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami peran Forum Masyarakat Kokoh (FMK) sebagai lembaga pelaksana program *corporate social responsibility (CSR)* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban di tingkat desa. FMK lebih dari sekadar menjadi penyalur program melainkan juga berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan *CSR*. Melalui kerangka pemikiran Jim Ife, pelaksanaan *CSR* oleh FMK dapat dipahami sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari proses identifikasi kebutuhan hingga pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, FMK berperan mengakomodasi aspirasi masyarakat desa sekaligus mengarahkan program agar selaras dengan kebutuhan serta kondisi sosial setempat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian bantuan, melainkan sebagai suatu proses yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan di wilayah desa mereka. Selain itu, peran Forum Masyarakat Kokoh (FMK) juga merefleksikan adanya pengelolaan relasi

antara perusahaan dan masyarakat. FMK berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta kepentingannya, sekaligus menjadi instrumen dalam menjalankan tanggung jawab sosial. Melalui peran tersebut, FMK berkontribusi dalam menjembatani perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat, sehingga implementasi program CSR dapat berlangsung secara lebih seimbang dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan program pemberdayaan, masyarakat tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai penerima bantuan, namun juga berfungsi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat didorong untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mengenali potensi yang dimiliki, serta memiliki keyakinan bahwa mereka mampu berperan dalam mengelola dan memanfaatkan program yang dijalankan. Proses ini menunjukkan terjadinya perubahan cara pandang masyarakat terhadap posisi dan peran mereka dalam pembangunan. Oleh karena itu, teori pemberdayaan masyarakat Jim Ife digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai efektivitas Forum Masyarakat Kokoh (FMK) dalam pelaksanaan program *corporate social responsibility (CSR)* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban. Efektivitas FMK dalam penelitian ini tidak sekedar diukur berdasarkan aspek keterlaksanaan program, melainkan juga dilihat dari sejauh mana FMK mampu mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat peran masyarakat desa, serta membangun relasi yang lebih harmonis antara perusahaan dan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.